

TRANSPARANSI INFORMASI SEBAGAI INVESTASI PUBLIK UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT YANG TERINFORMASI

Siti Samsiyah, SS.M.Si

**Universitas Terbuka
siti@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Teknologi telah menciptakan efisiensi pekerjaan dari sisi prosedur maupun manajemen. Dengan teknologi masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Negara yang masyarakatnya terinformasi adalah negara dimana mayoritas masyarakatnya banyak terlibat dalam bidang informasi, dari sektor pekerjaan dan kebutuhan masyarakat akan informasi cukup besar serta masyarakat memiliki banyak pilihan dalam mengakses informasi. Untuk kebutuhan informasi masyarakat yang berkaitan dengan pihak pemerintah khususnya pemerintahan daerah, ada di posisi pemerintahan tingkat kelurahan, kecamatan, satuan perangkat daerah (SKPD) dan muara untuk semua informasi tingkat kabupaten/kota ada di pihak pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) kabupaten/kota. Begitupula sebaliknya informasi dari pemerintah berupa sosialisasi program supaya cepat direspon oleh masyarakat diperlukan media yang sifatnya massal supaya sosialisasi tersebut cepat direspon oleh masyarakat. Kajian *Transparansi Informasi Sebagai Investasi Publik Untuk Membangun Masyarakat Yang Terinformasi* bertujuan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan akses informasi oleh masyarakat dengan cepat dan akurat. Kajian yang didasarkan oleh data sekunder berupa studi dokumen mengenai transparansi informasi serta hasil survey ke institusi pengelola dokumentasi. Hasil dari pengolahan data menunjukkan transparansi informasi dapat terbangun melalui pemanfaatan teknologi informasi, standar operasional layanan informasi yang diberlakukan di semua pengelola informasi, serta berbagai media cetak dan elektronik sebagai saluran sumber informasi untuk masyarakat dan bagi masyarakat yang menghendaki informasi yang diperlukan. Melalui pemanfaatan teknologi, saluran sumber informasi tercetak dan elektronik inilah akan mampu mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat, mampu

melayani informasi masyarakat dengan cepat dan akurat, dan sebaliknya sosialisasi program pemerintah pun dapat dengan cepat direspon oleh masyarakat.

Kata kunci: transparansi, informasi, masyarakat terinformasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keberagaman bahasa, budaya, serta tingkat pendidikan yang beragam juga. Dengan tingkat pendidikan yang beragam berimplikasi pada kebutuhan informasi yang berbeda juga antara daerah yang telah modern yang telah menggunakan piranti elektronik untuk menunjang aktivitas kehidupannya. Dan daerah yang bisa disebut 'konvensional' adalah daerah yang bisa disebut sangat minim dengan pemanfaatan piranti modern untuk menunjang aktivitas kehidupannya. Melalui keberagaman inilah perlu dibuat suatu saluran media yang mampu memberikan informasi yang sesuai tepat waktu, tepat sasaran, sesuai permintaan masyarakat dan sosialisasi program-program pemerintah yang dapat diterima oleh masyarakat.

Informasi merupakan komponen yang memiliki urgensi sangat tinggi disektor publik maupun privat. Dengan informasi yang tepat dan akurat perencanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan meminimalisir kesenjangan kehidupan di masyarakat. Hingga dekade-90an informasi antara masyarakat dan badan publik bersifat searah, dimana informasi hanya diberikan oleh badan publik/badan pemerintah untuk menginformasikan program-programnya. Di posisi masyarakat 'hanya ' menerima begitu saja setiap informasi yang diberikan. Artinya apakah informasi tersebut sesuai atau tidak bagi masyarakat tidak dipersoalkan, apakah informasi tersebut diperlukan atau tidak diperlukan masyarakat juga tidak diperhatikan. Pada dekade-90an kebutuhan masyarakat akan informasi belum seperti saat ini. Kebutuhan informasi hanya diperlukan oleh pihak-pihak tertentu, masyarakat masih kurang merasakan perlunya sebuah informasi.

Seiring kemajuan di sektor teknologi kebutuhan informasi masyarakat terus meningkat dan beragam. Masyarakat telah dibuat 'cerdas' dengan teknologi ini. Kejadian di belahan bumi lain dalam waktu hitungan menit sudah sampai pada kita di belahan bumi yang berbeda. Teknologi telah

merevolusi hampir di semua sektor kegiatan manusia. Tidak terkecuali kebutuhan informasi, dengan teknologi masyarakat menerima berita/informasi berjuta-juta setiap harinya. Dengan kemampuannya dalam menyaring informasi inilah masyarakat mulai merasakan perlunya informasi yang cepat, akurat sesuai kebutuhan mereka.

Upaya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan masyarakat tidak sia-sia setelah melalui perjuangan yang cukup panjang sejak tahun 2008 pemerintah telah mengeluarkan UU Keterbukaan Informasi Publik atau UU – KIP, dengan No. 14 tahun 2008. Melalui Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik inilah setiap masyarakat yang berkepentingan dengan informasi dapat mengajukan informasi yang diperlukan dengan prosedur yang telah diatur. Diantaranya menyerahkan identitas diri, menjelaskan kebutuhan informasinya serta mengisi formulir yang telah disiapkan oleh instansi yang dituju.

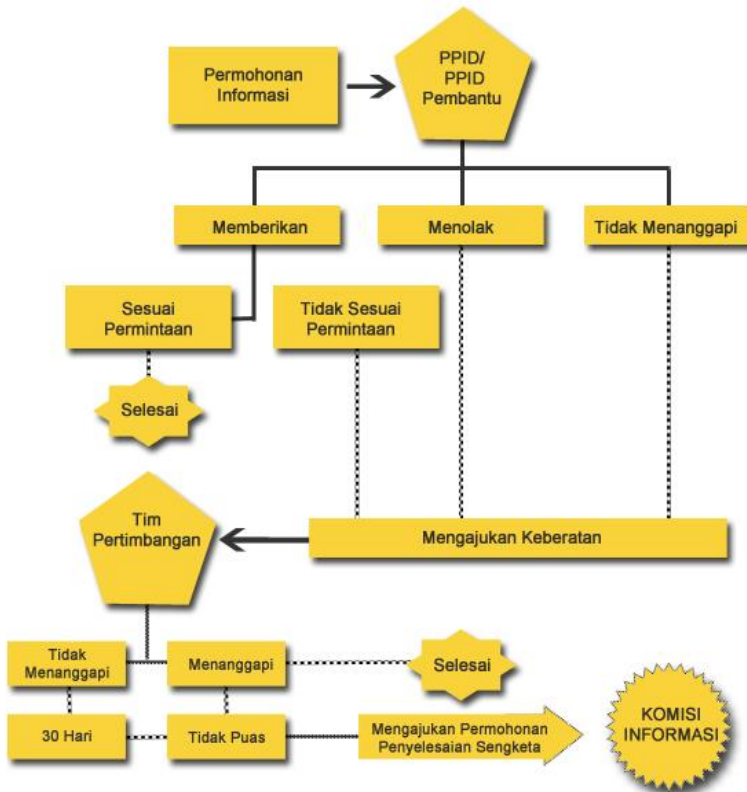
Makin cerdasnya masyarakat untuk memperoleh haknya berupa mendapatkan informasi yang diperlukan bagaimanakah profil sumber-sumber informasi yang mampu mengakomodasi keperluan masyarakat khususnya mengenai kebutuhahn informasi secara cepat dan akurat ?

Pembahasan

1. Badan Publik

Menurut definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah. Dari definisi ini terlihat bahwa badan publik merupakan seluruh instansi pemerintah yang ada di tingkat daerah maupun pusat, dari lingkup pemerintahan desa, kecamatan, pemerintah daerah, pemerintahan propinsi, pemerintahan pusat, departemen, departemen non kementerian, BUMN, BUMD, dan instansi pemerintahan lainnya. Karena penyelenggaraan badan publik berasal dari pendanaan pemerintah inilah penyelenggaraannya juga dituntut transparan, akuntabel. Dengan prosedur yang telah terstandarisasi di tiap instansi pemerintah inilah masyarakat yang memerlukan informasi dapat mengajukan kebutuhan informasinya ke pihak-pihak badan publik tersebut. Sedangkan badan publik pun

berkewajiban memberikan informasi pada masyarakat yang memintanya. Berikut prosedur tatacara pengajuan informasi ke badan publik. (<http://www.komisiinformasi.bantenprov.go.id>)



Mekanisme pengajuan informasi pada prosedur diatas dimulai dari pengajuan kebutuhan informasi masyarakat dari badan publik yang dituju hingga informasi yang diminta mengalami hambatan dan bermuara di Komisi Informasi (KI) yang ada di tingkat propinsi dan sebagian KI yang ada di tingkat kabupaten/kota.

Melalui prosedur yang telah terstandar inilah masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi dengan adanya jaminan, artinya jaminan pasti informasi akan diberikan oleh badan publik jika informasi tersebut memang sudah layak untuk dipublikasikan ke masyarakat atau ditolak/gugur

karena adanya cacat/kekurangsempurnaan terhadap informasi yang dikehendaki.

2. Peran Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi PPID

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan data–data pada badan publik yang terkait. Untuk tiap-tiap badan publik disebut dengan PPID pembantu terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk lingkup pemerintah daerah. Kewajiban PPID pembantu/SKPD ini adalah mengelola termasuk mempublikaskannya data atau informasi ke masyarakat. Waktu yang diperlukan adalah 14 hari kerja. Jika terjadi permasalahan pada permintaan data/informasi, misalkan informasi belum saatnya dipublikasikan akan dilimpahkan pada PPID di tingkat kabupaten/kota. Apabila pada tingkat PPID kabupaten kota masih terjadi permasalahan akan dilimpahkan ke Komisi Informasi(KI) di tingkat propinsi. Namun ada daerah–daerah tertentu yang ada di tingkat kabupaten/kota memiliki Komisi Informasi (KI) tingkat kabupaten kota, sehingga jika terjadi sengketa informasi Komisi Informasi (KI) yang ada di tingkat kabupaten/kota dapat segera menyelesaikan sengketa informasi. Pengelompokan informasi yang dipublikasikan sesuai UU No.14 tahun 2008 –KIP adalah informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat.

Berikut contoh informasi berkala yang diambil dari website-KI propinsi Banten

480 Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi

The screenshot shows the website of the Komisi Informasi Provinsi Banten. The main content is a table of documents with the following columns: Nama Dokumen, Deskripsi, and File. The table lists various reports and realizations of the budget from 2013 to 2015. On the right side, there is an 'AGENDA' section with three entries for 'Sidang Ajakasi Nontidaksi' on 02 NOV and 01 NOV. Below the agenda is an 'ARTIKEL' section.

Nama Dokumen	Deskripsi	File
Buku Laporan Tahunan 2015	Buku Laporan Tahunan 2015 Komisi Informasi Provinsi Banten	File
Laporan Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2015	File
Surat Pertanggung Jawaban	Surat Pertanggung Jawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 Komisi Informasi Provinsi Banten Bulan Mei	File
Surat Pertanggung Jawaban	Surat Pertanggung Jawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 Komisi Informasi Provinsi Banten Bulan April	File
Laporan Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran Komisi Informasi Provinsi Banten Bulan Desember 2014	File
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Komisi Informasi Provinsi Banten Trivulan I Tahun 2014 (Januari-Maret)	File
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Komisi Informasi Provinsi Banten Bulan Desember Thn 2013	File
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Komisi Informasi Provinsi Banten Bulan November 2013	File
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Komisi Informasi Provinsi Banten Bulan Oktober Thn 2013	File
Laporan Realisasi	Laporan Realisasi Anggaran Komisi Informasi Provinsi Banten Bulan September 2013	File

Informasi setiap saat,

The screenshot shows the website of the Komisi Informasi Provinsi Banten. The main content is a table of documents with the following columns: Nama Dokumen, Deskripsi, and File. The table lists various reports and realizations of the budget from 2013 to 2015. On the right side, there is an 'AGENDA' section with three entries for 'Sidang Ajakasi Nontidaksi' on 02 NOV and 01 NOV. Below the agenda is an 'ARTIKEL' section.

Nama Dokumen	Deskripsi	File
Struktur Komisi Informasi Provinsi Banten	Struktur Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2016	File
Rekapitulasi PSI 2015	Rekapitulasi penghitungan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tahun 2015	File
Grafik PSI 2015	Grafik Rekapitulasi Register Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2015	File
Pemeriksaan Badan Publik 2015	Hasil penilaian pemeriksaan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten / Kota Se-Provinsi Banten	File
Matrix Penyelesaian Sengketa Informasi	Grafik Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten per Januari s.d 21 Oktober 2015	File
Struktur Komisi Informasi Provinsi Banten	Struktur Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2015 - 2019	File
Rekapitulasi PSI 2014	Rekapitulasi penghitungan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tahun 2014	File
Grafik PSI 2014	Grafik Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2014	File
Pemeriksaan Badan Publik 2014	Hasil penilaian pemeriksaan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten / Kota Se-Provinsi Banten	File
Grafik PSI 2013	Grafik Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2013	File

Dengan cantuman informasi yang telah distandarkan dalam UU-KIP No. 14 tahun 2008 inilah masyarakat dipermudah untuk melakukan pengidentifikasian informasi yang diperlukan.

3. Transparansi Informasi Sebagai Investasi Publik

Mengapa transparansi informasi sebagai investasi publik, melalui transparansi informasi terbangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Dengan informasi yang transparan tergambar dengan jelas penyelenggaraan pembangunan, mulai dari sisi pendanaan, sasaran, proses pelaksanaan sampai pemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat. Untuk mendukung transparansi informasi badan publik dapat mewujudkan ke dalam media-media yang dijadikan saluran bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Menurut T.D Wilson (Lawanda, Ike Iswary :2015) menyatakan bahwa perilaku informasi (*information behavior*) merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, termasuk perilaku pencarian dan penggunaan informasi baik secara aktif maupun pasif. Sumber dan saluran informasi tersebut bisa berupa media teks (buku, majalah, atau Koran) maupun media elektronik sebagai media yang paling banyak digunakan di era informasi. Dengan dasar inilah badan publik dapat menyalurkan informasinya ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

Untuk media cetak sebagai contoh, berupa koran badan publik mempublikasikan kinerja keuangannya untuk diketahui oleh masyarakat. Untuk media elektronik badan publik dapat bekerjasama dengan media menyiarkan program-program dari pemerintah yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat.

Makin majunya teknologi informasi memberikan kemudahan bagi badan publik maupun masyarakat untuk mempublikasikan informasi dan mengakses informasi atau permohonan informasi pada badan publik yang dituju. Kondisi ini juga didukung mulainya masyarakat Indonesia sebagai masyarakat terinformasi. Ciri masyarakat informasi adalah tidak ada batasan dalam mentransfer informasi sehingga informasi dapat dibagikan, disebarluaskan ke berbagai wilayah hanya dalam waktu relative singkat.

Kesimpulan

Transparansi informasi sebagai investasi publik perlu lebih disosialisasikan lagi untuk mencapai pembangunan yang tepat sasaran dan tepat penggunaan yang pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Untuk mencapai transparansi informasi perlu dipersiapkan dari sisi masyarakat maupun sisi pemerintahannya. Dari sisi

masyarakat, perlu diberikan pengetahuan tatacara mengakses informasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh badan publik. Dari sisi pemerintahan perlu pengelolaan informasi yang sesuai standar pengelolaan yaitu informasi dikelompokkan sesuai peruntukannya, yaitu informasi pengecualian, informasi serta merta, informasi berkala. Untuk mewujudkan transparansi informasi badan publik juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu dengan mencantumkan informasi yang bisa diakses oleh publik pada laman badan publik bersangkutan.

Daftar Pustaka

Cahyono, Ma'ruf. 2015. *Perpustakaan Wakil Rakyat : Berdimensi Literacy dan Demokrasi*. Jakarta : Sagung Seto

Lawanda, Ike Iswary. 2015. *Integrasi Pustakawan Menuju Masyarakat Informasi : Suatu Perspektif Sosial –Budaya*. Jakarta : Sagung Seto

Mc. Farlan, F.Warren dan Sidarta. 1987. *Ledakan Informasi dan Manajemen: Menyongsong Era informasi, Manajemen Sistem Informasi Perusahaan, Bagaimana Eksekutif Mengambil Keputusan Secara Kompetitif*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo

Nurwono, Yuniarto. 1994. *Manajemen Informasi: Pendekatan Global*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Samsiyah, Siti dan Megafury Apriandhini. 2016. *Strategi Penyelesaian Sengketa Informasi (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informas –Banten)*. Penelitian –LPPM –UT.

UU –RI, Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (<http://www.komisiinformasi.bantenprov.go.id>)